

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945 berdampak pula terhadap perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Kekuasaan Jepang atas Indonesia berakhir setelah berkuasa selama kurang lebih 3,5 tahun (1942-1945). Tahap demi tahap pasukan Jepang ditarik mundur dari Indonesia. Tentara Sekutu dibawah pimpinan Jeneral Christison kemudian mendarat di Tanjung Priok pada tanggal 29 September 1945 dengan tujuan utama melucuti persenjataan tentara Jepang.

Kedatangan Sekutu ternyata diboncengi oleh NICA (*Netherland Indies Civil Administration*) yang akan berusaha kembali berkuasa di Indonesia. Proklamasi yang dikumandangkan oleh Soekarno sebagai wujud pernyataan kemerdekaan tidak sedikitpun dihiraukan oleh Belanda. Belanda masih menginginkan kekuasaan di negeri yang kaya akan potensi sumber daya alam ini.

Gesekan antara Belanda dengan rakyat Indonesia pun tidak dapat dihindarkan. Pada bulan Oktober, November dan Desember 1945, Jakarta menjadi ajang kekerasan dan teror, hal ini bahkan menyebabkan penduduk menutup pintu rumahnya sejak senja hari.¹ Tentara Sekutu maupun NICA memang memancing insiden dimana-mana dan kapan saja, sehingga ribuan orang menjadi korban.

Sidang kabinet tanggal 3 Januari 1946 memutuskan untuk memindahkan kedudukan pemerintah pusat RI ke Yogyakarta. Yogyakarta merupakan suatu

¹ Kustiniyati Mochtar, “Pak Sultan dari Masa ke Masa”, dalam Atmakanumah (Peny), *Tahta Untuk Rakyat Cela-cela Kehidupan Sultan HB IX*. Jakarta : PT. Gramedia, 1982, hlm. 67.

wilayah yang terletak di pedalaman Jawa, tepatnya pada bagian tengah sisi selatan Pulau Jawa. Sebelum menggabungkan diri dibawah RI, Yogyakarta merupakan suatu Kesultanan yang merupakan pecahan dari Kerajaan Mataram Islam, dimana Mataram Islam sendiri menurut Persetujuan Guyanti terbagi menjadi dua bagian, yakni Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Berdasarkan catatan sejarah, pada Kamis 29 *Jumadil Awal* 1680 tahun Jawa atau 13 Maret 1755 tepat satu bulan setelah perjanjian Guyanti yang ditandatangi tanggal 29 *Rabiul Akhir* 1680 tahun Jawa atau 13 Februari 1755, Pangeran Mangkubumi memproklamirkan berdirinya Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun tersebut. Sejak saat itulah ditetapkan sebagai hari kelahiran Kasultanan Yogyakarta sekaligus Yogyakarta sebagai ibukotanya.

Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan RI tidak bisa dilepaskan dari Yogyakarta. Selain karena Yogyakarta ditetapkan sebagai ibukota pemerintahan RI pada awal tahun 1946, Yogyakarta juga menyimpan sejarah yang sangat penting. Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari pemimpin Yogyakarta itu sendiri, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono IX (selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut dengan “Sri Sultan” saja). Tidak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan RI dikumandangkan di Jakarta, Sri Sultan menyambutnya bersama Paku Alam VIII dengan pernyataan bahwa Yogyakarta adalah bagian dari RI. Pernyataan tersebut segera ditanggapi oleh Soekarno dengan sambutan yang menyenangkan. Hubungan antara keduanya pun mulai terjalin. Hubungan yang

baik itu dapat dipahami bahwa Sri Sultan ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu apapun kecuali bangsa Indonesia menjadi merdeka dan Republik Indonesia dapat lestari.²

Sebelum dinobatkan menjadi Raja, Sri Sultan bernama Gusti Raden Mas Dorodjatun. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 April 1912 dan naik tahta menggantikan ayahnya pada tanggal 18 Maret 1940. Sebagai seorang raja yang masih berusia relatif sangat muda, maka banyak pihak menaruh harapan terhadap munculnya suatu fajar baru dalam Keraton Yogyakarta.³ Pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda masih bercokol di Indonesia, dimana Gubernur untuk wilayah Yogyakarta adalah Lucian Adams. Seperti para sultan sebelumnya, sebelum menjabat sebagai raja, maka terlebih dahulu diwajibkan menandatangani kontrak perjanjian dengan pemerintah Hindia Belanda, dimana kontrak tersebut pada dasarnya merupakan kekangan terhadap kekuasaan sultan yang berkuasa.

Masa antara penobatan Sri Sultan dengan menyerahnya Belanda atas Jepang tak berselang lama, hanya sekitar dua tahun (1940-1942). Setelah itu Yogyakarta berada di bawah kekuasaan militer Jepang. Kekuasaan Jepang ternyata juga tidak berlangsung lama, dimana disela-sela kekalahan Jepang atas Sekutu itulah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan RI, hingga kemudian Sri Sultan beserta rakyat Yogyakarta berdiri di bawah naungan Proklamasi RI itu.

² Sutrisno Kutoyo, *Sri Sultan Hamengkubuwono IX : Riwayat Hidup dan Perjuangan*. Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 1996, hlm. 158.

³Ahmad Adaby Darban, *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengkubuwono IX*. Jakarta : Depdikbud, 1998, hlm. 87.

Konflik RI-Belanda setelah kedatangan kembali pemerintah Hindia Belanda ternyata mendapat tanggapan dari dunia internasional. Inggris mendesak segera diadakannya perundingan gencatan senjata sebelum menarik semua pasukan mereka dari Jawa dan Sumatera pada bulan Desember 1946. Pada tanggal 12 November 1946 Indonesia untuk pertama kali diakui secara *de facto* dalam Perundingan Linggarjati.⁴ Hal ini merupakan alasan bagi beberapa negara adikuasa seperti Inggris dan AS untuk mengakui Indonesia secara *de facto*, menyusul beberapa negara seperti Mesir dan Yordania yang telah memberi pengakuan *de facto* dan *de jure* sebelum perjanjian Linggarjati.⁵

Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda mengingkari Perjanjian Linggarjati dengan melancarkan serangan militer yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda Pertama. Terjadinya peristiwa ini membuat Dewan Keamanan PBB turun tangan dengan membentuk *Committee of Good Offices* (Komisi Jasa Baik) yang terdiri dari wakil-wakil dari AS, Australia dan Belgia dalam upaya penyelesaian masalah tersebut. Akhirnya perundingan dimulai kembali dan Persetujuan Renville disepakati pada bulan Januari 1948. Perundingan yang dilaksanakan di atas Kapal USS Renville tersebut ternyata belum final, masih dilanjutkan dengan perundingan-perundingan yang lain.

⁴ M.C. Ricklefs, “A History of Modern Indonesia”, a.b. Dharmono Hardjowidjono, *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1991, hlm. 337.

⁵ G.M. Kahin, “Nationalism and Revolution In Indonesia”, a.b. Nin Bakdi Soemanto, *Refleksi Pergmulan Lahirnya Republik : Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Jakarta : UNS Press dan Pustaka Harapan, 1995, hlm. ix.

Tuntutan-tuntutan Belanda atas RI semakin kuat dan menekan. Belanda menuntut pembubaran TNI, salah satu atribut kedaulatan dan kemerdekaan RI yang utama. Belanda sangat tangkas melakukan perang totalnya, walaupun dalam kondisi gencatan senjata. Mereka terus menyerang dalam bidang politik dan ekonomi untuk meruntuhkan Republik Indonesia.⁶ Kebuntuan antara kedua belah pihak membawa Belanda pada keputusan untuk melaksanakan aksi militer yang sesungguhnya pada tanggal 19 Desember 1948, dimana hal tersebut dikenal dengan Agresi Militer Belanda Kedua.

Pasukan Belanda mulai menyerang Yogyakarta dengan pesawat-peawat tempur mereka. Mula-mula mereka melumpuhkan lapangan udara Maguwo yang akan digunakan untuk pendaratan pasukan mereka. Pesawat pembom dan penembak roket Belanda P. 51 dan *Spitfires* mulai menjinakkan Yogyakarta dengan serangan yang dilakukan oleh Brigade Marinir Belanda. Kekuatan militer Belanda secara cepat dapat menguasai Kota Yogyakarta.⁷

Kabinet RI segera bersidang untuk membahas serangan Belanda tersebut. Sebelum Presiden, Wakil Presiden beserta petinggi-petinggi yang lain ditawan oleh Belanda, dalam sidang telah diputuskan bahwa akan dibentuk pemerintahan darurat di Sumatera oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan TNI yang akan bergerilya dengan dipimpin oleh Panglima Besar Soedirman.

Sementara itu Sri Sultan dibatasi gerakannya oleh Belanda terbatas hanya di Keraton saja. Menyadari hal ini Sri Sultan tidak tinggal diam. Inilah saatnya Sri

⁶ A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 9 Agresi Militer Belanda II*. Bandung : Disjarah dan Angkasa, 1979, hlm. 165.

⁷ G.M. Kahin, *op.cit.*, hlm. 427.

Sultan memimpin perlawanan terhadap Belanda, meski dalam upaya tersebut Sri Sultan berperan sebagai pengatur strategi di Keratonnya. Pelaksana-pelaksana di lapangan misalnya adalah Letkol Soeharto, dimana ia berperan sebagai pemimpin dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Sri Sultan juga tetap berkomunikasi dengan pejuang-pejuang yang lain, meski hanya melalui para kurir yang menyamar sebagai *abdi dalem* ketika keluar dan masuk Keraton.

Dengan melihat uraian latar belakang di atas, maka akan tampak peranan Sri Sultan dalam perjuangan revolusi di Indonesia, terutama pada masa Agresi Militer Belanda II. Sri Sultan berperan penting dalam perjuangan bersama tokoh-tokoh lain sehingga kemerdekaan RI dapat dipertahankan. Maka Fr. Meak Parera sangat tepat dengan pernyataannya, “Sri Sultan Hamengkubuwono IX tidak saja dikagumi masyarakat Jawa, melainkan juga seluruh rakyat Indonesia. Sebagai raja Jawa dia punya andil dalam perjuangan nasional”.⁸ Jiwa nasionalis Sri Sultan dapat menjadi contoh yang baik untuk generasi masa kini yang sedikit demi sedikit terkikis semangat kebangsaannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang kehidupan Sri Sultan Hamengkubuwono IX?

⁸ Fr. Meak Parrera, Ketokohan Sri Sultan Hamengku Buwono IX Reformator Budaya dan Perintis Orde Baru, *Prisma*, Edisi khusus 20 Tahun Prisma, 1991, hlm. 41.

2. Bagaimana upaya Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam menegakkan kemerdekaan RI?
3. Bagaimana peranan Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada masa Agresi Militer Belanda Kedua?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum
 - a. Mengembangkan kemampuan berfikir secara kritis, analitis, objektif dalam mengkaji suatu peristiwa.
 - b. Mengembangkan serta menambah karya penulisan ilmiah, terutama dalam bidang penulisan sejarah.
2. Tujuan Khusus
 - a. Mendeskripsikan latar belakang kehidupan Sri Sultan Hamengkubuwono IX
 - b. Mendeskripsikan upaya Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam menegakkan Kemerdekaan RI.
 - c. Menganalisis peranan Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada masa Agresi Militer Belanda Kedua.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pembaca
 - a. Memberi tambahan pengetahuan kepada pembaca mengenai perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan RI, khususnya pada masa Agresi Militer Belanda Kedua (1948).

- b. Sebagai sumbangsih bagi dunia pendidikan yang tercermin dari ketokohan seseorang.
2. Bagi Penulis
- a. Menambah pengetahuan mengenai perjuangan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam mempertahankan kemerekaan RI, khususnya pada saat Agresi Militer Belanda Kedua.
 - b. Guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian. Penelitian bisa hanya menggunakan kajian pustaka atau kajian teori atau menggunakan kedua-duanya.⁹ Melalui kajian pustaka inilah penulis mendapatkan pustaka-pustaka atau literatur yang akan digunakan dalam penelitian sejarah.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX naik tahta menggantikan ayahnya pada tanggal 18 Maret 1940. Sebelum diangkat menjadi penguasa di Kasultanan Yogyakarta, beliau bernama Gusti Raden Mas (GRM) Dorodjatun. Setelah dinobatkan kemudian menjadi *Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah IX*¹⁰. Dorodjatun dilahirkan pada hari Sabtu tanggal 12 April 1912

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulian Tugas Akhir Skripsi*. Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY, 2006, hlm. 3.

¹⁰ Kustiniyati Mochtar, *op.cit.*, hlm. 21.

atau menurut hitungan Jawa jatuh pada tanggal 25 *Rabingulakir* tahun *Jimakir* 1842. Ayahnya bernama Gusti Pangeran Haryo (GPH) Puruboyo yang kemudian dinobatkan menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, sedangkan ibunya adalah R.A. Kustilah yang kemudian menyandang gelar Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom.

Sejak berusia 6 tahun, Dorodjatun menempuh pendidikan di *Eerste Europese Lagere School B* (Een B) di Kampementstraat atau Jalan Panembahan Senopati sekarang. Setelah beberapa tahun duduk di Een B ia pindah ke *Neutrale Europese Lagere School* di Pakemweg (Jalan Kaliurang). Setelah selesai dari Pakemweg, kemudian ia melanjutkan sekolah ke sebuah HBS di Semarang. Pada tahun 1930, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII membuat rencana lain, Dorodjatun akan dikirim ke negeri Belanda untuk menempuh pendidikan tinggi.

Di Negeri Belanda inilah Dorodjatun benar-benar mendapatkan wawasan yang luas. Dorodjatun menempuh perkuliahan pada fakultas Indologi di *Rijksuniversiteit Leiden*. Selain aktif dalam perkuliahan, Dorodjatun juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, seperti perkumpulan-perkumpulan debat maupun diskusi. Berbekal pengalaman-pengalaman di Leiden inilah kelak Dorodjatun akan memperjuangkan nasib bangsanya.

Untuk membahas latar belakang kehidupan Sri Sultan, penulis menggunakan beberapa sumber buku, diantaranya adalah buku yang disunting oleh Atmakusumah, berjudul *Tahta Untuk Rakyat : Celaht-celaht Kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX*. Buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia pada tahun 1982. Isi dari buku ini terdapat wawancara langsung antara penyusun dengan Sri Sultan

Hamengkubuwono IX. Selain itu penulis juga menggunakan sumber penunjang yang lain, diantaranya adalah buku yang berjudul Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengkubuwono IX terbitan Depdikbud oleh Ahmad Adaby Darban.

Proklamasi yang dikumandangkan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 segera mendapat sambutan yang luar biasa. Salah satu sambutan yang luar biasa tersebut datang dari Yogyakarta. Melalui *Amanat Seripaduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan Jogjakarta 5 September 1945*, Sri Sultan yang kemudian diikuti Paku Alam VIII menyatakan berdiri dibelakang Proklamasi Kemerdekaan RI. Dukungan Sri Sultan terhadap Proklamasi RI dinyatakan oleh Selo Soemardjan sebagai berikut :

...proclamation of Indonesia's independence on August 17, 1945 by Soekarno and Hatta, he, now as Sultan Hamengkubuwono IX, of his own free will made it known to the world that his Sultanate of Yogyakarta was a part of the newly established Republic of Indonesia, with the status of special territory and with himself responsible directly to the President.¹¹

(...proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta, beliau sebagai Sultan HB IX, dalam kebebasannya akan membuatnya diketahui oleh dunia bahwa Kasultanan Yogyakarta adalah bagian dari Republik Indonesia, dengan status wilayah istimewa dan dengan bertanggungjawab langsung kepada Presiden)

Pada awal tahun 1946, pusat pemerintahan dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Pemindahan tersebut dikarenakan keadaan Jakarta yang tidak kondusif untuk pelaksanaan pemerintahan. Sri Sultan menyambut dengan baik rencanan pemindahan ibukota tersebut. Rombongan para petinggi negara disambut langsung oleh Sri Sultan di Stasiun Tugu. Hal ini menunjukkan bahwa Sri Sultan benar-benar setia kepada RI.

¹¹ Selo Soemardjan, In Memoriam : Hamengkubuwono IX, Sultan of Yogyakarta, 1912-1988. *Indonesia*, No. 47 (April), 1989, hlm. 116.

Kedatangan kembali Belanda ke Indonesia yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya membuat Belanda berupaya mencari dukungan untuk melawan RI. Salah satu upaya pencarian dukungan tersebut ditujukan kepada Sri Sultan, namun Sri Sultan menolak hal itu. Padahal seandainya Sri Sultan bersedia bekerjasama dengan Belanda, beliau akan diangkat menjadi super wali negara atas wilayah seluruh Jawa dan Madura.

Sri Sultan rupanya memahami bahwa Belanda akan memanfaatkan dirinya untuk kembali menguasai wilayah Hindia Belanda yang telah direbut oleh Jepang dan kemudian oleh RI. Sri Sultan selalu menyadari bahwa sejak dahulu nenek moyangnya berupaya penuh melawan Belanda meski mengalami pasang surut. Selain itu pendidikannya di tengah-tengah keluarga Belanda memberi kesempatan kepadanya untuk menyaksikan bagaimana pembantu Jawa diperbudak oleh keluarga Belanda yang menjadi tuannya. Pengalaman ini diakuinya kelak menumbuhkan semangat nasionalisme pada dirinya.¹²

Untuk membahas hal tersebut digunakan berbagai sumber, diantaranya adalah buku yang berjudul Sri Sultan Hamengkubuwono IX : Riwayat Hidup dan Perjuangan yang ditulis oleh Sutrisno Kutoyo dan diterbitkan oleh Penerbit Mutiara Sumber Widya. Selain itu penulis juga menggunakan sumber-sumber yang relevan lainnya, seperti buku berjudul Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974 yang ditulis oleh P.J. Suwarno. Buku ini sebenarnya adalah disertasi P.J. Suwarno yang diterbitkan oleh Kanisius

¹² P.J. Suwarno, “Situasi Yogyakarta sebagai Pusat Pemerintahan RI periode 1946-1999”. Makalah Ceramah di Museum Benteng Yogyakarta, 1994, hlm. 8, dalam Ahmad Adaby Darban, *op.cit.*, hlm. 41.

pada tahun 1994. Isi dari buku ini mendeskripsikan secara terperinci mengenai upaya-upaya Sri Sultan dalam melakukan perubahan-perubahan birokrasi di Yogyakarta. Sistem birokrasi yang dipimpin oleh Sri Sultan pun mengalami perubahan seiring dengan bergabungnya Yogyakarta dengan Republik Indonesia, diantaranya adalah dengan dibentuknya Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) di Yogyakarta yang kemudian berfungsi menjadi badan legislatif tingkat daerah. Dengan dibentuknya badan legislatif ini maka demokrasi di Yogyakarta semakin berkembang ke arah yang lebih baik.

Kedatangan Belanda kembali ke Indonesia membawa dampak yang menyulitkan. Hal tersebut mengharuskan RI melakukan perundingan-perundingan dengan Belanda yang seringkali hasil perundingan tersebut merugikan pihak RI. Belum puas dengan perundingan, Belanda pun menggunakan aksi militer yang dianggapnya sebagai upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Namun dari pihak RI, aksi militer tersebut dianggap sebagai suatu hal yang melanggar perjanjian.

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan Agresi Militer Kedua sebagai pelanggaran atas Persetujuan Renville. Belanda berdalih bahwa RI tidak mampu menjaga keamanan dan ketertiban. Serangan atas Yogyakarta segera menimbulkan kepanikan masyarakat yang semula mengira bahwa hal tersebut merupakan latihan perang yang dilakukan oleh pihak Republik karena memang sebelumnya pihak Republik mengadakan latihan perang. Hal ini dinyatakan oleh Soebagijo I.N. sebagai berikut :

Dek samana isih esuk umun-umun tanggal 19 Desember 1948. Kira-kira ija djam 6-an ngono. Wong ja dong kapinujon dina Minggu. Dadak

keprungu suwara ngaung-ngaung mbrebegi kuping. Ora sethitik uwong sing nduweni pangira yen suwara-suwara kang keprungu mau suwarane mesin mabure Republik, perlu nganakake perang-perangan.¹³

(Pada waktu itu masih pagi pada tanggal 19 Desember 1948 kira-kira pukul 06.00. Orang-orang mendengar suara mesin pesawat terbang. Tidak sedikit warga yang mengira bahwa suara mesin pesawat terbang tersebut adalah pesawat terbang pihak Republik yang mengadakan latihan perang)

Pada waktu itu Presiden Soekarno dengan beberapa orang seperti Ir. Djuanda, Mr. Ali Sastroamidjojo dan Kusnan berada di kediaman Presiden di Gedung Negara untuk segera mengadakan rapat kabinet. Sementara itu Sri Sultan pun juga bergegas menuju ke Gedung Negara. Sri Sultan kemudian diperintahkan untuk menjemput P.M. Hatta yang masih berada di Kaliurang. Akhirnya Sri Sultan bersama Syahrir menuju ke Kaliurang dengan maksud menjemput P.M. Hatta agar sidang kabinet dapat segera dilaksanakan.

Setelah semua anggota kabinet berkumpul untuk bersidang, maka diputuskan bahwa Pemerintah RI tetap berada di Yogyakarta dan kekuasaan pemerintahan RI akan dipimpin oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang berkedudukan di Sumatera.¹⁴ Pada saat inilah perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI mengalami masa-masa yang kritis. Belanda merasa telah menghancurkan RI setelah Yogyakarta sebagai ibukota RI dapat dikuasai dan ditawannya petinggi-petinggi RI termasuk Presiden dan Wakil Presiden ke Bangka. Namun RI ternyata masih mampu bertahan, dengan Pemerintahan Darurat di Sumatera, TNI bergerilya bersama Pangsar Sudirman, serta diplomat-

¹³ Soebagijo I.N., *Sri Sultan Hamengkubuwono IX*. Surabaja : Panjebar Semangat, 1953, hlm. 20.

¹⁴ Kustiniyati Mochtar, *op.cit.*, hlm. 67.

diplomat RI yang berada di luar negeri, kedudukan dan kedaulatan RI terus diperjuangkan.

Satu-satunya wilayah di Ibukota yang tidak dikuasai Belanda adalah Keraton Yogyakarta. Belanda memberi semacam *imun* bagi kediaman Sri Sultan tersebut. Hal ini dilakukan Belanda sebagai salah satu siasat untuk membujuk Sri Sultan agar mendukung langkahnya. Sri Sultan adalah orang yang sangat berpengaruh di Yogyakarta sehingga Belanda beranggapan apabila Sri Sultan dapat dikuasai maka rakyat Yogyakarta tentu dapat dikuasai pula. Ternyata anggapan Belanda meleset sangat jauh, raja yang satu ini ternyata setia kepada RI meski Belanda menawarkan kekuasaan bagi dirinya atas Yogyakarta akan dipulihkan.

Belanda mencoba menghancurkan bangsa Indonesia dengan menduduki Yogyakarta dan berusaha keras untuk mengajak bekerjasama dengan Sri Sultan, tentunya dalam usaha melanjutkan penjajahan di Indonesia. Belanda berkali-kali mengirimkan utusan-utusannya untuk menemui Sri Sultan seperti Berkhuis, Residen Stok, Sultan Hamid, Prof. Dr. Husein Djajadiningrat dan Kol. Van Langen. Sri Sultan selalu menolak para utusan Belanda tersebut dengan alasan sakit¹⁵

Peranan Sri Sultan menjadi sangat penting dalam perjuangan RI yang kritis ini. Di dalam Keraton mulailah Sri Sultan menjalankan siasat perjuangannya. Meskipun ruang gerak Sri Sultan dibatasi hanya dalam Keraton,

¹⁵ Prabuningrat, “Ketika Terjadi Serangan Umum 1 Maret 1949”, dalam Atmokusumah (Peny), *op.cit.*, hlm. 170.

namun Sri Sultan tidak menyerah begitu saja, melalui para kurir yang menyamar sebagai *abdi dalem* (pegawai) Keraton, komunikasi dengan pejuang-pejuang yang berada di luar Yogyakarta tetap terjalin baik. Komunikasi dengan Panglima Besar Soedirman yang memimpin gerilya pun terjalin melalui para kurir tersebut.

Ketika mendengar berita bahwa pada akhir Februari 1949 masalah antara Indonesia-Belanda akan dibicarakan pada forum PBB, maka Sri Sultan pun bertindak dengan cepat. Sri Sultan ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa RI beserta TNI masih mempunyai kekuatan, tidak seperti yang dipropagandakan oleh Belanda bahwa RI telah lenyap. Keinginan tersebut dituangkan oleh Sri Sultan dalam gagasan penyerangan umum terhadap pos-pos Belanda. Rencana tersebut dibicarakan dengan Letkol Soeharto sebagai komandan gerilya yang bersangkutan, dimana sebelumnya telah meminta persetujuan dari Pangsar Soedirman.

Akhirnya diputuskan bahwa pada tanggal 1 Maret 1949 akan dilancarkan serangan umum terhadap pos-pos pendudukan Belanda. Pelaksanaan serangan dirahasiakan dan penyusupan ke kota sudah dimulai sebelum hari “H” dengan mendekati posisi Belanda dengan cara “mengantong”. Gerilyawan menggunakan tanda janur kuning yang diikatkan pada leher mereka masing-masing. Selain itu diterapkan sistem sandi untuk mengenal sesama pejuang dan menghindari mata-mata Belanda dengan salam ucapan “Mataram” dan jawaban “Menang”.¹⁶

¹⁶ Suhartono W. Pranoto, “Enam Jam di Yogyakarta 1 Maret 1949 Mitos atau Sejarah?”. *Makalah Seminar Sejarah*, Yogyakarta, 1 Maret 2010. Bandung : DISJARAH AD, 2010, hlm. 8.

Serangan secara mendadak tersebut ternyata membawa keberhasilan. Setelah terjadi tembak menembak yang dimulai pukul 06.00 pasukan Belanda pun terdesak dan hanya bisa bertahan di pos masing-masing sambil menunggu bantuan pasukan dari Semarang. Bantuan pasukan Belanda dari Semarang tiba di Yogyakarta pukul 11.00 dan pasukan gerilyawan pun mundur untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak pada pukul 13.00.

Pasukan Belanda yang telah tiba dari Semarang melakukan pengejaran dan memuntahkan pelurunya ke tempat yang diduga sebagai tempat persembunyian gerilyawan. Keraton pun tak luput dari penggeledahan karena Belanda telah mencurigai bahwa selama ini Sri Sultan selalu mendukung gerakan gerilyawan dan menyediakan Keraton sebagai tempat persembunyian. Para gerilyawan yang menyamar sebagai *abdi dalem* di dalam Keraton memang sulit untuk diketahui, hal inilah yang membuat kesulitan pihak Belanda untuk membuktikan bahwa Sri Sultan bersikap non kooperatif terhadap Belanda.

Keberhasilan serangan para gerilyawan yang dikenal dengan “Serangan Umum 1 Maret 1949” juga tidak lepas dari peran Letkol Soeharto yang menjabat sebagai komandan gerilya di wilayah kota Yogyakarta. Kemenangan tersebut segera ditindaklanjuti oleh Sri Sultan dengan mengirim berita ke Bukittinggi, dimana di tempat tersebut Sjafruddin Prawiranegara beserta pejabat-pejabat lain memimpin Pemerintahan Darurat RI. Berita tersebut kemudian disampaikan ke AS setelah sebelumnya dikirimkan melalui New Delhi.

Dewan Keamanan PBB yang sedang bersidang tentu saja bereaksi keras. Hal ini menyadarkan kepada pihak internasional bahwa kekuatan RI dan TNI

masih tegak berdiri, dukungan terhadap RI pun mengalir dari berbagai negara. Dewan Keamanan PBB mendesak agar Belanda mengembalikan ibukota RI di Yogyakarta dan segera diadakan perundingan untuk menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak.

Pada tanggal 14 April 1949 dimulailah perundingan Indonesia-Belanda yang disetujui pada 7 Mei 1949 dan dikenal dengan Persetujuan Roem-Roijen. Perundingan tersebut segera disusul dengan penarikan mundur pasukan Belanda dari Yogyakarta pada tanggal 24-29 Juni 1949. Sejak tanggal itu pula tanggung jawab pemerintahan dan keamanan di Yogyakarta dipegang kembali oleh Sri Sultan.¹⁷

Untuk mengkaji hal tersebut penulis menggunakan beberapa sumber buku, diantaranya adalah buku yang ditulis oleh Pierre Heijboer berjudul Agresi Militer Belanda Memperebutkan Pending Zamrud Sepanjang Khatulistiwa 1945/1949 terbitan Grasindo di Jakarta. Buku ini mendeskripsikan jalannya serangan Belanda dalam aksi militernya, baik agresi yang pertama maupun agresi yang kedua.

Buku yang lain adalah Pelurusan Sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 yang ditulis Sri Endang Sumiyati,dkk pada tahun 2001, terbit di Yogyakarta oleh Media Pressindo. Isi dari buku ini mendeskripsikan peranan Sri Sultan, khususnya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Buku tersebut juga dilengkapi dengan kesaksian dari para pelaku sejarah bahwa pengagas Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah Sri Sultan.

¹⁷ Kustiniyati Mochtar, *op.cit.*, hlm. 80.

F. Historiografi yang Relevan

Historiografi adalah rekonstruksi sejarah melalui proses pengujian dan menganalisis secara kritis rekaman-rekaman peninggalan masa lampau.¹⁸ Historiografi yang Relevan dalam penulisan sejarah berisi mengenai kajian-kajian historis dengan tema atau topik yang sama, yang pernah dilakukan sebelumnya. Pada bagian ini juga dijelaskan apa yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹⁹ Skripsi yang mengkaji tentang Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah sebagai berikut.

Nelly Anugrawati dalam skripsinya yang berjudul “Pembangunan Selokan Mataram Sebagai Upaya Perlindungan Sultan Hamengkubuwono IX terhadap Masyarakat Sleman Pada Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)” pada tahun 2008 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsi ini membahas mengenai peranan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam melindungi rakyatnya dari Romusha yang diterapkan pada masa pendudukan Jepang.

Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi yang akan disusun karena periode atau batasan waktu dalam obyek penelitian tidak sama. Selain itu skripsi Nelly Anugrawati membahas mengenai peranan Sri Sultan dalam pembangunan Selokan Mataram pada masa pendudukan Jepang, sedangkan skripsi yang akan disusun membahas peranan Sri Sultan pada masa kemerdekaan di Indonesia.

¹⁸ Louis Gottschalk, “Understanding History : A Primer of Historical Method”, a.b. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*. Jakarta : UI Press, 1982, hlm. 94.

¹⁹ Tim Penyusun, *loc.cit.*

Eni Lestari dalam skripsinya yang berjudul “Kebijakan Politik dan Perjuangan Sri Sultan Hamengkubuwono IX Pada Zaman Pendudukan Jepang” pada tahun 2006 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsi ini membahas mengenai peranan Sri Sultan Hamengkubuwono IX ditinjau dari segi politik dalam menghadapi pendudukan Jepang tahun 1942-1945.

Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi yang akan disusun, dalam skripsinya, Eni Lestari mengkaji kebijakan-kebijakan politik Sri Sultan pada masa pendudukan Jepang, sedangkan skripsi yang akan disusun tidak hanya terbatas pada peranan politik Sri Sultan saja. Selain itu rentang waktu yang dikaji juga berbeda, Eni Lestari mengambil periode pada masa pendudukan Jepang sedangkan skripsi yang akan disusun merupakan periode pasca kemerdekaan Indonesia.

G. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian Sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tulisan.²⁰ Menurut Nugroho Notosusanto, metode sejarah mempunyai empat langkah kegiatan, yaitu Heuristik, Verifikasi, Interpretasi dan Historiografi.²¹

²⁰ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 43-44.

²¹ Nugroho Notosusanto, *Norma-norma Dasar Penelitian Penulisan Sejarah*. Jakarta : Dephankam, 1971, hlm. 35.

a. Heuristik

Heuristik yaitu kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau yang dikenal dengan data sejarah. Langkah heuristik ini dilakukan setelah penulis menentukan topik penelitian. Heuristik diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber Primer adalah sumber yang disampaikan oleh saksi mata.²²

Sumber-sumber primer dalam penulisan ini diantaranya adalah :

Amanat Seripaduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan Jogjakarta 5 September 1945 (amanat ini berisi mengenai pernyataan Sri Sultan mengenai status wilayah Yogyakarta yang bergabung RI)

Surat Pribadi Sri Sultan kepada Mr. Sudjono Tertanggal 26 Maret 1949 (Surat ini menceriterakan situasi Yogyakarta pada tanggal 1 dan 2 Maret 1949)

Teks Proklamasi 30 Juni 1949 oleh Sri Sultan (Proklamasi ini dikumandangkan oleh Sri Sultan HB IX).

Selain sumber primer juga terdapat sumber sekunder, yaitu kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya. Menurut I Gde Widja, sumber sekunder yaitu kesaksian dari saksi orang lain.²³ Adapun sumber sekunder dalam penulisan ini diantaranya adalah sebagai berikut.

Ahmad Adaby Darban. (1998). *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengkubuwono IX*. Jakarta : Depdikbud.

Sutrisno Kutoyo. (1996). *Sri Sultan Hamengkubuwono IX : Riwayat Hidup dan Perjuangan*. Jakarta : Mutiara Sumber Widya.

Suwarno, P.J. (1994). *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*. Yogyakarta : Kanisius.

²² Dudung Abdurrahman, *op.cit.*, hlm. 56.

²³ I Gde Widja, *Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*. Jakarta : Depdikbud, 1989, hlm. 18.

Heijboer, Pierre. (1998). *Agresi Militer Belanda Memperoleh Pending Zamrud Sepanjang Khatulistiwa 1945/1949*. Jakarta : Grasindo.

Sri Endang Sumiyati,dkk. (2001). *Pelurusan Sejarah Serangan 1 Maret 1949*. Yogyakarta : Media Pressindo.

b. Kritik Sumber

Setelah sumber sejarah dalam berbagai kategorinya itu terkumpul, tahap yang berikutnya adalah kritik sumber atau verifikasi. Tahap kritik sumber ini dilakukan dengan dua macam, yaitu sebagai berikut.

1) Kritik Ekstern

Kritik Ekstern yaitu usaha meneliti semua sumber yang telah didapatkan untuk diperiksa dan diselidiki keasliannya. Pada tahap ini asal-usul sumber juga diperiksa sehingga otentitas data dapat dipertanggungjawabkan. Pada bagian ini penulis memeriksa identitas dari buku ataupun sumber-sumber yang digunakan.

2) Kritik Intern

Kritik Intern yaitu usaha meneliti semua sumber yang didapatkan dengan tujuan mengetahui kesahihan sumber atau kredibilitas. Pada bagian ini penulis membandingkan sumber yang satu dengan yang lainnya untuk meyakinkan kebenaran dari sumber-sumber tersebut.

Sebagai contoh, penulis melakukan kritik intern terhadap buku suntingan Atmokusumah yang berjudul Tahta Untuk Rakyat Cela-cela Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX. Sebagai pembanding penulis juga melakukan kritik intern terhadap buku berjudul Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengkubuwono IX yang ditulis oleh Ahmad Adaby Darban. Dari kedua buku tersebut terdapat

kesamaan informasi mengenai riwayat dan perjuangan Sri Sultan dalam menentang Belanda. Meskipun demikian buku yang disunting oleh Atmakusumah lebih lengkap karena pada bagian isi disertakan wawancara langsung dengan Sri Sultan.

b. Interpretasi

Interpretasi disebut juga dengan penafsiran. Interpretasi terdiri dari dua macam, yakni analisis dan sintetis. Analisis berarti menguraikan, dan secara terminologis berbeda dengan sintetis yang berarti menyatukan.²⁴ Namun keduanya, analisis dan sintesis, dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi. Pada tahap interpretasi ini penulis berupaya untuk menguraikan sumber, hal ini dilakukan karena sumber-sumber sejarah terkadang mengandung berbagai kemungkinan. Langkah selanjutnya setelah data terkumpul, kemudian disatukan dan menjadi fakta sejarah yang akurat.

c. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Sebagai fase terakhir dalam metode sejarah, historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Layaknya laporan penelitian ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah itu hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian, sejak dari awal sampai dengan akhirnya (penarikan kesimpulan).²⁵

²⁴ Dudung Abdurrahman, *op.cit.*, hlm. 64.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 67.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik, sosiologis, militer dan antropologis. Pendekatan politik dimaksudkan untuk menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarkhi sosial, pertentangan kekuasaan dan sebagainya.²⁶ Pendekatan politik dalam penelitian ini digunakan untuk memahami langkah-langkah politik yang ditempuh oleh RI dalam mempertahankan kedaulatannya termasuk upaya diplomasi agar mendapat dukungan dari pihak internasional.

Menurut Sartono Kartodirdjo pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk meneropong segi-segi sosial berkaitan dengan peristiwa yang dikaji.²⁷ Pendekatan ini juga memberikan gambaran tentang kondisi nyata masyarakat suatu daerah dilihat dari segi mata pencaharian, pendidikan, kepercayaan dan lain-lain. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat latar belakang kehidupan dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kehidupan serta perjuangan Sri Sultan dalam mempertahankan kedaulatan RI.

Pendekatan Antropologis adalah pendekatan yang dikembangkan untuk mempelajari masalah-masalah budaya.²⁸ Melalui pendekatan inilah akan dipaparkan mengenai budaya-budaya yang berkembang di Yogyakarta, khususnya

²⁶ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2007, hlm. 63.

²⁷ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 1992, hlm. 4.

²⁸ Dudung Abdurrahman, *op.cit.*, hlm. 14.

di Keraton yang pada akhirnya akan berpengaruh juga kepada Sri Sultan sebagai sultan atau raja yang sah atas Ngayogyakarta Hadiningrat.

Pendekatan Militer dalam hal ini digunakan untuk menjelaskan tugas dan tanggung jawab utama militer, yaitu membela dan mempertahankan eksistensi negara dari ancaman dan serangan dari luar. Melalui pendekatan militer inilah akan dipaparkan mengenai upaya-upaya TNI bersama rakyat dalam melawan kekuatan Belanda. Pendekatan Militer juga bertujuan untuk mengetahui adanya sekelompok orang yang diorganisir dengan disiplin militer yang mempunyai tujuan utama yaitu untuk bertempur dan memenangkan pertempuran guna mempertahankan kemerdekaan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan berisi mengenai gambaran singkat isi yang akan ditulis. Sistematika Pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian pustaka, historiografi yang relevan, metode penelitian, pendekatan penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua akan dibahas mengenai latar belakang kehidupan Sri Sultan. Dibahas pula riwayat pendidikan hingga masa perjuangan dalam menegakkan Republik Indonesia. Sri Sultan yang menempuh pendidikan di Belanda membuat dirinya benar-benar sadar dan paham akan watak penjajah bangsanya. Hal ini kelak sangat berguna dalam menghadapi pihak Belanda.

Bab ketiga akan menjelaskan mengenai sikap Sri Sultan dalam menanggapi Proklamasi RI yang dikumandangkan di Jakarta. Sri Sultan menyatakan bahwa

Yogyakarta merupakan bagian dari Republik Indonesia. Selain itu juga akan dibahas mengenai pemindahan ibukota RI ke Yogyakarta. Kesetiaan Sri Sultan terhadap RI tidak diragukan lagi dengan keikhlasannya membuka Yogyakarta sebagai ibu kota RI.

Bab keempat akan membahas mengenai Sri Sultan dan Agresi Militer Belanda II. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai strategi-strategi yang dilakukan oleh Sri Sultan beserta pemimpin-pemimpin pejuang yang lainnya dalam menunjukkan serta mendorong negara-negara lain untuk mendukung perjuangan RI, terlebih pasca Agresi Militer Belanda II. Di bagian ini juga akan dijelaskan mengenai Serangan Umum 1 Maret yang berhasil membawa perjuangan fisik menuju perundingan perdamaian. Keberhasilan ini tentu tak terlepas dari upaya Sri Sultan.

Bab terakhir adalah kesimpulan. Pada bab ini akan dikemukakan secara singkat, padat dan jelas jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan bukan merupakan ringkasan penelitian.